

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Agency*

Teori *Agency* ini menggambarkan adanya hubungan positif antara shareholder dengan para manager melalui *Good Corporate Governance*. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer.

Jensen (1976) menyatakan bahwa *Agency theory* (teori keagenan) merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut lebih jauh sebagai pelaksana yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal sebagai *principal* membangun suatu kontrak kerjasama yang disebut dengan *nexus of contract*. Kontrak kerjasama ini berisi delegasi yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan bekerja secara maksimal untuk mengoptimalakan laba dan memberikan keuntungan yang tinggi kepada pemilik modal (*owner*). Sedangkan pihak *principal* mengatur terhadap kinerja agen untuk memastikan modal yang dimiliki dapat dikelola dengan baik.

Pearce (2014) menyatakan bahwa adanya pemisahan antara agen dan *principal* terbaikannya kepentingan *principal*. Hal ini berarti, pemisahan tersebut menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Dalam hal ini konsep teori keagenan, *principal* akan memberikan wewenang kepada manajer

untuk mengurus sistem pada perusahaan, namun tindakan *principal* terkadang masih tidak bertindak sesuai yang seharusnya sehingga dapat menimbulkan masalah keagenan. Untuk meminimalisasi informasi yang tidak seimbang, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian tata kelola perusahaan sebagai alat motivasi agen dalam menjalankan praktik bisnis untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

Jadi, dapat disimpulkan dari teori *agency* inilah, perusahaan menyadari perlunya penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perusahaan. Selain untuk meminimalisir kerugian akibat penyalahgunaan wewenang manajemen dalam pengelolaan perusahaan untuk memperoleh laba juga untuk menggambarkan citra yang baik bagi perusahaan kepada publik dan calon investor.

2.1.2 Good Corporate Governance

Corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang di harapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham (Herawaty, 2008). Sedangkan Isgiyarta (2011) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, direktur perusahaan, kreditor, negara, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka, yaitu. sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Komite nasional kebijakan *corporate governance* menjelaskan bahwa *corporate governance* merupakan acuan bagi perusahaan dalam rangka:

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang di dasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan
- b. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan.
- c. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya di landasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
- e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemenang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga meingkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Dari teori diatas dapat penulis simpulkan bahwa *Good Corporate Governance* atau lebih dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu sistem atau aturan yang mengatur bagaimana mengelola perusahaan dengan

baik dengan memperjelas hak – hak dan kewajiban para pemangku kepentingan dimulai dari dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham yang memiliki kepentingan internal dan eksternal juga para *stakeholders*.

Pemerintah telah membentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2006 dan lembaga ini telah menerbitkan pedoman umum untuk *Corporate Governance* (GCG) yang berisi lima prinsip dasar sebagai berikut:

a. Transparansi

Transparansi (*transparency*), Merupakan kewajiban perusahaan untuk memastikan ketersediaan dan pengungkapan informasi material dan penting sehingga para pemangku kepentingan mengetahui status keuangan, manajemen, dan kepemilikan perusahaan. Dalam hal ini perusahaan atau perseroan harus memiliki inisiatif untuk mengungkapkan masalah timbul baik dari perubahan perundang-undangan maupun untuk pertimbangan pengambilan keputusan oleh petinggi perusahaan seperti pemegang saham, kreditur, dan *stakeholders* lainnya.

KNKG (2011) (Hamdani 2016:73) mengemukakan implementasi transparansi dalam praktek bisnis yaitu sebagai berikut:

- 1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat di perbandingkan serta mudah di akses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- 2) Informasi yang harus di ungkap meliputi : visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan, dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan

anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

- 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, rahasia jabatan, dan hak – hak pribadi.
- 4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*), Wibowo. (2010) dalam (Hamdani, 2016: 74) merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Karena vitalnya peran akuntabilitas yang merupakan prasyarat untuk melakukan kinerja yang berkesinambungan, maka akuntabilitas harus dipastikan menjamin tersedianya mekanisme dan tanggung jawab para jajaran tinggi manajemen perusahaan atas semua keputusan yang diambil dan kebijakan yang telah dirumuskan maka harus dipastikan kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan profesional.

Hamdani, (2016:74) Akuntabilitas dapat di implementasikan dalam praktis bisnis sebagai berikut:

- 1) Perusahaan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing – masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi nilai – nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
- 2) Perusahaan menjamin bahwa semua organ perusahaan termasuk karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*
- 3) Perusahaan menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- 4) Perusahaan memiliki ukuran kinerja untuk semua jajahan perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- 5) Perusahaan memiliki etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang dijalankan oleh setiap organ perusahaan mulai dari pimpinan atas sampai pada karyawan tingkat bawah.

c. Responsibility

Tanggung jawab (*Responsibility*), Hendro. (2017:99) merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk mematuhi berbagai peraturan perundang – undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*.

Hamdani. (2016:75) Prinsip tanggung jawab dalam praktik bisnis sebagai berikut:

- 1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by – laws*).
- 2) Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial diantaranya kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d. Independensi

Independensi (*Independency*), Hendro (2017:99) merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk melakukan pengelolaan secara independen sehingga masing – masing organ perusahaan tidak saling mendominasi serta tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Hamdani. (2016:76) menyatakan bahwa pedoman pelaksanaan independensi diantaranya:

- 1) Masing – masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpegaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interenst*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
- 2) Masing – masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang –

undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu sama dengan yang lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairnes abd Equality*), Hamdani. (2016:76) merupakan kewajiban perusahaan untuk selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Wibowo (2010) dalam Hamdani (2016:76) Kedua unsur ini mengandung unsur keadilan yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil memiliki tujuan yang sama untuk kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor, serta masyarakat luas.

Khomsiyah (2005) dalam Hamdani (2016:76) terlebih keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dan tindakan kecurangan.

Hamdani (2016:77) pedoman pelaksanaan kewajaran dan kesetaraan dalam praktik bisnis sebagai berikut:

- 1) Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi.
- 2) Perusahaan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

- 3) Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkariir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

Jadi dapat disimpulkan dari pemaparan diatas prinsip pada *corporate governance* merupakan transparansi yang memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi yang relevan dan material, akuntabilitas mempehitungkan kepentingan pemegang saham dan merupakan prasyarat untuk melakukan kinerja yang bekesinambungan, tanggung jawab dengan mematuhi undang-undang, indepedensi pengolahan secara independen serta kewajaran dan kesetaraan yang adil.

IICG (2010), GCG dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh institusi perusahaan untuk menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perusahaan dalam jangka panjang. Danisi (2011), GCG dipicu oleh krisis ekonomi yang melanda dunia, agar krisis tidak terulang kembali maka dikembangkan sistem dan struktur pengelolaan perusahaan yang lebih baik. Penerapan GCG mewajibkan suatu perusahaan menerapkan stuktur dan sistem tertentu. Dalam kaitannya dengan struktur, perusahaan diwajibkan menciptakan perangkat organisasi tertentu seperti komisariss independen, komite audit, komite remunerasi untuk menjalankan fungsi spesifik, sedangkan dalam hal sistem manajemen perusahaan diwajibkan mengikuti proses atau aturan tertentu dalam pengambilan keputusan dan dalam menjalankan kegiatannya secara umum.

GCG dalam penelitian ini mengambil indikator mengenai komposisi dewan komisariss independen dimana tiap personalnya akan dihitung sebagai penentu

pergerakan *corporate governance* dari suatu perusahaan yang akan menjadi kunci dari penilaian perusahaan dari sisi tata kelola perusahaan yang baik.

a. Komisaris Independen

Komisaris independen dipilih berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) keputusan dari RUPS tidak berdasarkan pada jumlah suara yang biasanya satu orang satu suara tetapi berdasarkan pada jumlah saham yang dimilikinya. Komisaris independen memiliki tugas yakni melakukan pengawasan dan masukan kepada dewan direksi. Sehingga komisaris independen memiliki fungsi yaitu mengawasi kualitas informasi atas kinerja dewan direksi juga untuk mengawasi kelengkapan laporan kinerja dewan direksi. Perihal hal ini komisaris independen memiliki posisi yang sangat penting dalam perusahaan.

Komisaris independen merupakan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang dari pengetahuan dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan (Sukrisno, 2014:110). Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus memiliki komisaris independen yang proporsional. Proporsional dalam artian memiliki jumlah perbandingan yang sama dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas (*non-controlling stakeholders*) minimal jumlah komisaris independen yakni 30% dari jumlah dewan direksi.

Pemerintah mengatur perihal independensi direksi perusahaan dalam aturan Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-305/BEI/07-2004 pasal 3 ayat 1.6 yang membahas syarat menjadi komisaris independen yakni:

- a. Komisaris independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum penunjukkan sebagai komisaris tak terafiliasi dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- b. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur atau komisaris dari perusahaan tercatat.
- c. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan yang rangkap dalam perusahaan lain dan tercatat.
- d. Komisaris independen tidak menjadi anggota atau orang dalam lembaga penunjang pasar modal yang jasanya digunakan dalam perusahaan tercatat selama 6 bulan sebelum penunjukkan.

b. Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan pemegang kekuasaan dalam suatu perusahaan. Dewan direksi adalah organ perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolegal dalam perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat menjalankan tugas dan wewenangnya. Dan juga dapat mengambil keputusan sesuai tupoksi masing-masing. Namun uga perlu digaris bawahi bahwa semua keputusan anggota direksi adalah tanggung jawab bersama. Namun berada dalam ruang lingkup tanggung jawab direktur utama yang bertugas mengkoordinasi kegiatan yang direksi laksanakan.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG,2006) menyatakan tugas dan tanggungjawab direksi dalam perusahaan yakni:

- a. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perusahaan perbankan.

- b. Dewan direksi mengelola bank sesuai tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam setiap kegiatan perbankan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan komite manajemen resiko serta satuan kerja kepatuhan.
- e. Direksi telah menindaklanjuti penemuan auditing dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau hasil pengawasan badan otoritas.
- f. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada investor melalui rapat umum pemegang saham.
- g. Direksi telah mengungkapkan kebijakan perbankan yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
- h. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan atau jasa profesional sebagai konsultan kecuai untuk proyek yang bersifat khusus telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja dan tanggung jawab, serta konsultan merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
- i. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, dan akurat kepada komisaris.

- j. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja.

Kriteria dan komposisi dewan direksi dalam (Tri Hendro dan Conny, 2014:95) adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah anggota dewan direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.
- 2) Semua anggota dewan direksi telah berdomisili di Indonesia.
- 3) Penggantian atau penambahan anggota dewan direksi telah memperhatikan rekomendasi dari komite nasional.
- 4) Mayoritas anggota direksi telah memiliki pengalaman setidaknya 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai eksekutif bank, kecuali bank syariah.
- 5) Anggota dewan direksi baik secara individu maupun bersama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu emiten.
- 6) Anggota direksi tidak memberikan kuasa hukum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi. Proporsi ukuran dewan direksi diukur dengan cara:

Ukuran Dewan Direksi = Jumlah Seluruh Dewan Direksi

c. Komite Audit

Dewan komisaris membentuk komite audit bertujuan untuk membantu tugas pengawasan. Komite audit muncul disebabkan karena meningkatnya skandal yang timbul akibat kecurangan dan kelalaian yang dilakukan oleh direktur dan komisaris perusahaan di berbagai negara yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan sangat minim.

Komposisi jabatan dan independensi komite audit dalam (Conny, 2014:98) yaitu:

- 1) Anggota komite audit paling kurang terdiri dari seorang komisaris independen seorang pihak independen ahli di bidang hukum dan perbankan.
- 2) Komite audit diketuai oleh komisaris independen
- 3) Anggota komite audit paling kurang 51% adalah komisaris independen dan pihak independen.
- 4) Anggota komite audit memiliki integritas dan moral yang baik.

Hasnanti menyatakan tugas dan tanggung jawab komite audit dalam (Cenik, 2014:111) adalah membantu dewan komisaris antara lain:

- 1) Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai prinsip dan tanggung jawab.
- 2) Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan yang transparansi.
- 3) Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit dan kemandirian audit eksternal sesuai prinsip akuntabilitas.
- 4) Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit.

Proporsi komite audit diukur dengan:

Komite audit = jumlah komite audit

d. Indeks Good Corporate Governance

The *Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) adalah sebuah lembaga independen yang melakukan kegiatan diseminasi dan pengembangan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di Indonesia. Tujuan dibentuk IICG adalah

untuk memasyarakatkan konsep *good corporate govrnance* dan manfaat penerapan prinsip-prinsip GCG seluas-luasnya dalam rangka mendorong terciptanya dunia usaha Indonesia yang beretika dan bermartabat.

Corporate Governance Perception index (CGPI) adalah riset dan pemeringkatan penerapan GCG di perusahaan publik yang tercatat di BEI. Pelaksanaan CGPI dilandasi oleh pemikiran tentang pentingnya mengetahui sejauh mana perusahaan-perusahaan publik menerapkan GCG. Hasil program riset dan pemeringkatan GCPI merupakan penilaian dan pemeringkat penerapan GCG pada perusahaan yang menjadi peserta dengan memberikan skor dan pembobotan nilai berdasarkan acuan yang telah dibuat.

Pemeringkatan CGPI didesain menjadi 3 kategori berdasarkan tingkat atau level yang dapat dijelaskan menurut skor penerapan GCG seperti tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Skor Penerapan *Good Corporate Governance*

No	Skor	Predikat
1	85,00 – 100,00	Sangat Terpercaya
2	70,00 – 84,99	Terpercaya
3	55,00 – 69,99	Cukup Terpercaya

Sumber: IICG

Faktor-faktor yang dinilai dalam CGPI dalam melakukan penilaian penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan, CGPI memiliki beberapa faktor yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian, diantaranya:

- 1) Komitmen yang menunjukkan wujud kesungguhan organ perusahaan dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
- 2) Transparansi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menyampaikan berbagai informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan akurat.
- 3) Akuntabilitas yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam mempertanggungjawabkan seluruh proses pencapaian kinerja secara transparan dan wajar.
- 4) Responsibilitas yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 5) Independensi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menjamin tidak adanya dominasi atau intervensi dari suatu partisipan terhadap partisipan lainnya.
- 6) Keadilan yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*).
- 7) Kompetensi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menunjukkan kemampuannya untuk menggunakan otoritasnya sesuai dengan dan fungsinya, inovatif dan kreatif.

- 8) Kepemimpinan yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menunjukkan corak kepemimpinan yang dapat mentransformasikan organisasi kearah yang lebih baik.
- 9) Kemampuan bekerjasama yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menunjukkan kemampuan bekerjasamanya untuk mencapai tujuan bersama secara bermartabat.
- 10) Visi, misi dan tata nilai yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan untuk memahami pokok-pokok yang terkandung di dalam pernyataan visi, misi dan tata nilai perusahaan yang akan menjadi panduan bagi perusahaan dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi yang dilakukannya.
- 11) Moral dan etika yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap proses bisnis sesuai dengan prinsip GCG.
- 12) Strategi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi.

Dalam menyusun sebuah laporan keuangan, isi yang dimasukkan kedalamnya tentu membutuhkan penelitian dan penyusunan yang tepat. Program CGPI mempunyai tiga ruang lingkup dan fokus penilaian dalam penerapan *corporate governance* yang baik dalam perusahaan, yaitu aspek kepatuhan, aspek kesesuaian, dan aspek kinerja. Penilaian pelaksanaan *good corporate governance* secara sempit mencakup komitmen perusahaan dan aturan, sedangkan secara luas

mencakup komitmen dan hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Secara lebih lengkap akan dijelaskan di bawah ini:

1) Aspek kepatuhan dalam penerapan *good corporate governance* adalah pemenuhan berbagai tuntutan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh regulator. Aspek ini memastikan bahwa semua operasi perusahaan bisnis telah dilakukan dengan baik dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku guna menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan perusahaan.

2) Aspek kesesuaian dalam implementasi *good corporate governance* adalah kesesuaian kebijakan dan operasi perusahaan dengan norma, etika, dan nilai-nilai diyakini.

3) Aspek kinerja dalam implementasi *good corporate governance* mencakup perwujudan pencapaian kinerja perusahaan secara finansial dan non finansial.

Perusahaan yang Baik adalah suatu sistem (*input*, proses, *output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi untuk pencapaian tujuan perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik termasuk untuk mengatur hubungan tersebut dan mencegah kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki (Zarkasyi, 2019:96). Dari definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang digunakan sebagai tata kelola perusahaan dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak.

2.1.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah analisis untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan dalam penerapan aturan pelaksanaan keuangan yang benar dan tepat (Fahmi, 2017:2). Penilaian kinerja suatu perusahaan adalah berbeda-beda karena itu tergantung kepada ruang lingkup bisnis yang dijalankannya. Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan berbeda dengan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan. Hal ini juga terjadi pada perusahaan yang bidang keuangannya seperti perbankan memiliki bidang usaha yang sangat berbeda dengan industri lainnya, karena perbankan dikenal sebagai perantara yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus) dengan pihak yang tidak memiliki dana. (defisit keuangan) dan tugas bank adalah menjembatani keduanya.

Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur atau menentukan sejauh mana kualitas perusahaan. Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan tersebut. Dari laporan keuangan tersebut, dapat diketahui keadaan *financial* dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan selama periode tertentu (Jumandani, 2012).

Kinerja keuangan merupakan prestasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dalam suatu periodetertentu dan tertuang pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan (Yuliana, 2017). Kinerja keuanganperusahaan merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Dimana salah satu tujuan penting didirikannya

perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan dalam perusahaan dilakukan untuk mengetahui apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan perencanaan (Kirana, 2016).

Dengan meningkatnya kinerja keuangan perusahaan berarti perusahaan dapat mencapai tujuan dari didirikannya perusahaan tersebut. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, dimana perusahaan dikatakan mempunyai kinerja baik atau bermasalah dapat dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan baik profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, pertumbuhan maupun aktivitas (Rivandi, 2016).

Penilaian kinerja setiap perusahaan berbeda-beda tergantung pada ruang lingkup bisnis yang dijalankannya. Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan berbeda dengan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan. Hal ini juga terjadi pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti sektor perbankan yang jelas memiliki lini bisnis yang berbeda dengan sektor lainnya, karena perbankan dikenal sebagai perantara yang menghubungkan kelebihan dana dengan kekurangan dana dan bank memiliki tugas menjembatani mereka untuk menghubungkan keduanya. Sama halnya dengan perusahaan pertambangan yang memiliki produk dan manajemen yang berbeda dengan perusahaan lain. Perusahaan pertambangan sangat bergantung pada kondisi sumber daya alam yang digali dan juga pada kapasitas kandungan tambang yang tersedia.

Ada 5 tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum. Fahmi (2012:3), yaitu:

- a. Melakukan review terhadap data laporan keuangan.

Review disini dilakukan dengan tujuan audit ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, sehingga hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertimbangkan.

- b. Melakukan perhitungan.

Penerapan metode perhitungan disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang akan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga hasil perhitungan tersebut menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan analisis yang diinginkan.

- c. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.

Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya.

- d. Melakukan penafsiran terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami oleh perusahaan tersebut.

- e. Mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

Pada fase terakhir ini, sesuai dengan berbagai permasalahan yang muncul, dicari solusinya dengan memberikan masukan atau masukan, agar segala kendala

dan hambatan yang selama ini ada dapat teratasi. Dalam penelitian ini pengukuran kinerja keuangan diukur menggunakan rasio profitabilitas. Profitabilitas adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya (Hery, 2016:104). Perkiraan profitabilitas perusahaan bervariasi karena tergantung pada skala operasi yang dioperasikan. Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan berbeda dengan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan. Maka begitu juga pada perusahaan dengan sektor keuangan seperti perbankan yang jelas mempunyai dunia bisnis berbeda dengan dunia bisnis lainnya, disebabkan seperti yang diketahui perusahaan perbankan adalah mediasi yang menghubungkan mereka yang mempunyai kelebihan dana (*surplus financial*) dengan mereka yang mempunyai kekurangan dana (*deficit financial*) dan bank bertugas untuk mengoptimalkan kedua sisi.

Fahmi(2018:80) menerangkan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai efektivitas manajemen yang terdapat dalam perusahaan secara menyeluruh untuk memahami tingkat dari keuntungan yang diperoleh, baik berasal dari investasi maupun penjualan. Semakin tinggi dalam mendapatkan keuntungan, maka rasio profitabilitas pada perusahaan semakin baik.

Kasmir (2016:196) menjelaskan definisi rasio profitabilitas adalah rasio yang bertujuan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan guna menghasilkan laba. Penggunaan rasio ini dapat menjadi alat penilaian yang berkaitan dengan kemampuan kerja manajemen pada perusahaan di suatu periode tertentu. Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas yang digunakan yaitu *Return on Assets (ROA)*.

Maka peneliti menyimpulkan bahwa rasio profitabilitas merupakan gambaran pada laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan/ badan usaha yang bersangkutan hal tersebut tercipta pada informasi yang diperoleh pada *balance sheet* (neraca), *income statement* (laporan laba-rugi), dan *cash flow statement* (laporan arus kas) serta hal-hal lain yang ikut mendorong sebagai penambah kekuatan *financial performance* tersebut. Pengukuran kinerja suatu perusahaan yang dilakukan oleh manajemen setiap periodenya sangat bermanfaat guna menilai kemajuan yang telah dicapai perusahaan dan menghasilkan informasi yang bisa dimanfaatkan oleh manajemen untuk pengambilan suatu keputusan serta mampu menciptakan kinerja perusahaan yang baik untuk para pemegang saham.

Untuk mengukur kinerja dilakukan analisis menggunakan rasio profitabilitas yang pada penelitian ini menggunakan rasio keuangan. Semakin tinggi nilai profitabilitas suatu perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik sehingga memicu investor dalam ikut meningkatkan nilai beli saham yang bertambah dan memberikan pengaruh pada bertambahnya nilai kinerja perusahaan.

a. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Kasmir (2015:198) menyatakan bahwa rasioprofitabilitas mempunyai tujuan yang biasa digunakan untuk pihak dalam maupun pihak luar perusahaan. Terutama diperuntukkan kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Adapun tujuan dari rasio profitabilitas ialah sebagai berikut:

- 1) Digunakan sebagai alat hitung keuntungan atau laba yang telah diperoleh perusahaan pada periode tertentu.

- 2) Untuk memprediksi keuntungan dalam suatu perusahaan ditahun sebelumnya dengan saat ini.
- 3) Untuk menafsirkan besarnya perkembangan yang berkaitan dengan laba ataupun keuntungan perusahaan dari waktu-kewaktu.
- 4) Untuk memperkirakan terkait besarnya laba bersih setelah pajak (EAT) dengan menggunakan modal sendiri.
- 5) Untuk mengevaluasi daya produksi dari keseluruhan biaya yang didapatkan oleh suatu perusahaan dan berasal dari modal sendiri maupun pinjaman.
- 6) Dan tujuanlainnya.

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas yaitu untuk;

- 1) Mengetahui seberapa besarnya tingkat keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dalam satu periode.
- 2) Mengetahui posisi laba dalam perusahaan ditahun sebelumnya dan tahun sekarang.
- 3) Mengetahui peningkatan laba dari waktu-kewaktu.
- 4) Mengetahui besarnya tingkat laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Mengetahui produktivitas kaseluruhan dana suatu perusahaan yang telah digunakan baik dari modal pinjaman maupun sendiri.
- 6) Manfaatlainnya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa manfaat dalam menggunakan profitabilitas yaitu untuk mengetahui berapa besarnya tingkat keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dalam satu periode. Penelitian ini menggunakan satu rasio untuk

mengukur profitabilita syaitu *Return On Equity* (ROW). *Return On Equity* (ROE). ROE merupakan rasio yang mengukur hasil pengembalian atas ekuitas yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih.berikut pengukuran rasio ROE:

$$ROE = \frac{Earning\ After\ Tax}{Asset}$$

Pengukuran kinerja keuangan penting sebagai sarana atau indikator dalam rangka memperbaiki kegiatan operasional perusahaan. Dengan perbaikan kinerja operasional diharapkan bahwa perusahaan dapat mengalami pertumbuhan keuangan yang lebih baik dan juga dapat bersaing dengan para perusahaan yang lain lewat efisiensi dan efektivitas. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan bersamaan dengan proses analisis. Analisis kinerja keuangan merupakan suatu proses pengkajian kinerja keuangan secara kritis, yang meliputi peninjauan data keuangan, penghitungan, pengikhtisaran, pengukuran, interpretasi, dan pemberian solusi terhadap masalah keuangan perusahaan pada beberapa alat analisis.

Berdasarkan tekniknya analisis kinerja keuangan dapat dibedakan menjadi 9 macam, yakni:

- a. Analisis perbandingan laporan keuangan yakni merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dari dua periode atau lebih untuk menunjukkan perubahan dalam jumlah absolut maupun dalam jumlah presentase relatif.

- b. Analisis tren, yakni merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan dan kinerja perusahaan, yang menunjukkan penurunan atau kenaikan.
- c. Analisis presentase per komponen, yakni merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui presentase masing-masing komponen aset terhadap total aset, kemudian presentase masing-masing komponen hutang dan modal terhadap total aset, dan presentase masing-masing komponen laporan laba rugi terhadap penjualan bersih.
- d. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, yakni merupakan teknik analisa yang dipakai guna mengindikasi besarnya sumber dan penggunaan modal kerja selama dua periode waktu yang menjadi perbandingan.
- e. Analisis sumber dan penggunaan kas, yakni merupakan teknik analisa yang dipakai guna mengetahui kondisi laporan kas dan perubahan kas pada suatu periode waktu pelaporan.
- f. Analisis rasio keuangan, yakni merupakan teknik analisa yang dipakai sebagai pengetahuan keterkaitan diantara akun tertentu dalam neraca maupun laporan rugi laba.
- g. Analisis perubahan laba kotor, yakni merupakan teknik analisis yang dipakai guna menggambarkan posisi laba kotor dari periode awal ke periode selanjutnya, dan penyebab terjadinya perubahan laba kotor dalam periode.
- h. Analisis titik impas, yakni merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

- i. Analisis kredit, yakni merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu permohonan kredit debitur kepada kreditur seperti pada umumnya bank.

Ukuran laba menggambarkan kinerja manajemen dalam menghasilkan profit untuk membayar bunga kreditur, deviden investor, dan pajak pemerintah. Akhir-akhir ini telah banyak dijumpai kecenderungan untuk lebih memperhatikan ukuran laba yang terdapat pada laporan laba rugi dibandingkan dengan ukuran lainnya. Informasi laba juga dapat dipakai untuk mengestimasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dimasa yang akan datang atau memprediksi atau menafsirkan resiko dalam berinvestasi (Hery, 2016:30).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, beberapa peneliti terdahulu akan memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Berikut ini adalah beberapa ringkasan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	I.B Made Puniayasa, Nyoman Triaryati (2016)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Struktur Kepemilikan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang masuk dalam Indeks	<i>Good Corporate Governance</i> , Struktur Kepemilikan dan Modal Intelektual Variabel x: Variabel y:	Analisis Regresi Linier Berganda	Secara parsial variabel <i>GCG</i> dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kepemilikan

		CGPI	Kinerja keuangan perusahaan		manajerial dan modal intelektual berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
2	Alvian Adhiprasetya, Zulaikha (2019)	Pengaruh <i>Corporate Governance Perception Index</i> Terhadap Nilai Perusahaan dan Kinerja Keuangan Perusahaan	Variabel x: Analisis GCG Variabel y: Nilai Perusahaan dan Kinerja Keuangan Perusahaan	Analisis Regresi Linier Berganda	GCG tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
3	MG. Kentris indarti, Lusi Extaliyus (2013)	Pengaruh <i>Corporate Governance Perception Index (CGPI)</i> , Struktur Kepemilikan dan Ukuran perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan	Variabel x: Analisis GCG, struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan Variabel y: Kinerja keuangan	Analisis Regresi Linier Berganda	Secara parsial GCG dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
4	Dwinanto Priyo Susetyo, Sri Herawati Ramadani (2020)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT Bank Mandiri Persero Tbk.	Variabel x: Analisis GCG Variabel y: Kinerja Keuangan	Analisis Regresi Linier Berganda	Variabel GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan PT Bank Mandiri Persero Tbk.
5	Jennyta Fitra, Rina Asmeri, Nova Begawati (2021)	Pengaruh tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>) dan Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Variabel x: Analisis GCG, dan Kinerja lingkungan Variabel y: Kinerja Keuangan Perusahaan	Analisis Regresi Linier Berganda	Secara parsial tata kelola perusahaan GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

6	Denta Wisnu Pradipta (2012)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi empiris pada perusahaan yang termasuk dalam pemeringkatan CGPI tahun 2009-2011)	Kualitas <i>Good Corporate</i> Kinerja (Studi pada yang dalam CGPI)	Variabel x: Analisis Regresi Linier Berganda Variabel y: Kinerja keuangan perusahaan		<i>Good corporate governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
7	Lupi Pratama, Manasse Siahaan (2021)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.	<i>Good</i> dan Kinerja Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Variabel x: Analisis Regresi Linier Berganda dan ukuran perusahaan Variabel y: kinerja keuangan perusahaan		Secara parsial GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
8	Novida Dwi Khumairoh, Yudhanta Sambharakr eshna, Nurul Kompyurini (2014)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan sebagai Intervening.	Kualitas <i>Good Corporate</i> Nilai dengan Keuangan Variabel	Variabel x: <i>Path Analysis</i> Variabel y: Nilai Perusahaan Variabel z: Kinerja keuangan perusahaan		Variabel <i>good corporate governance</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

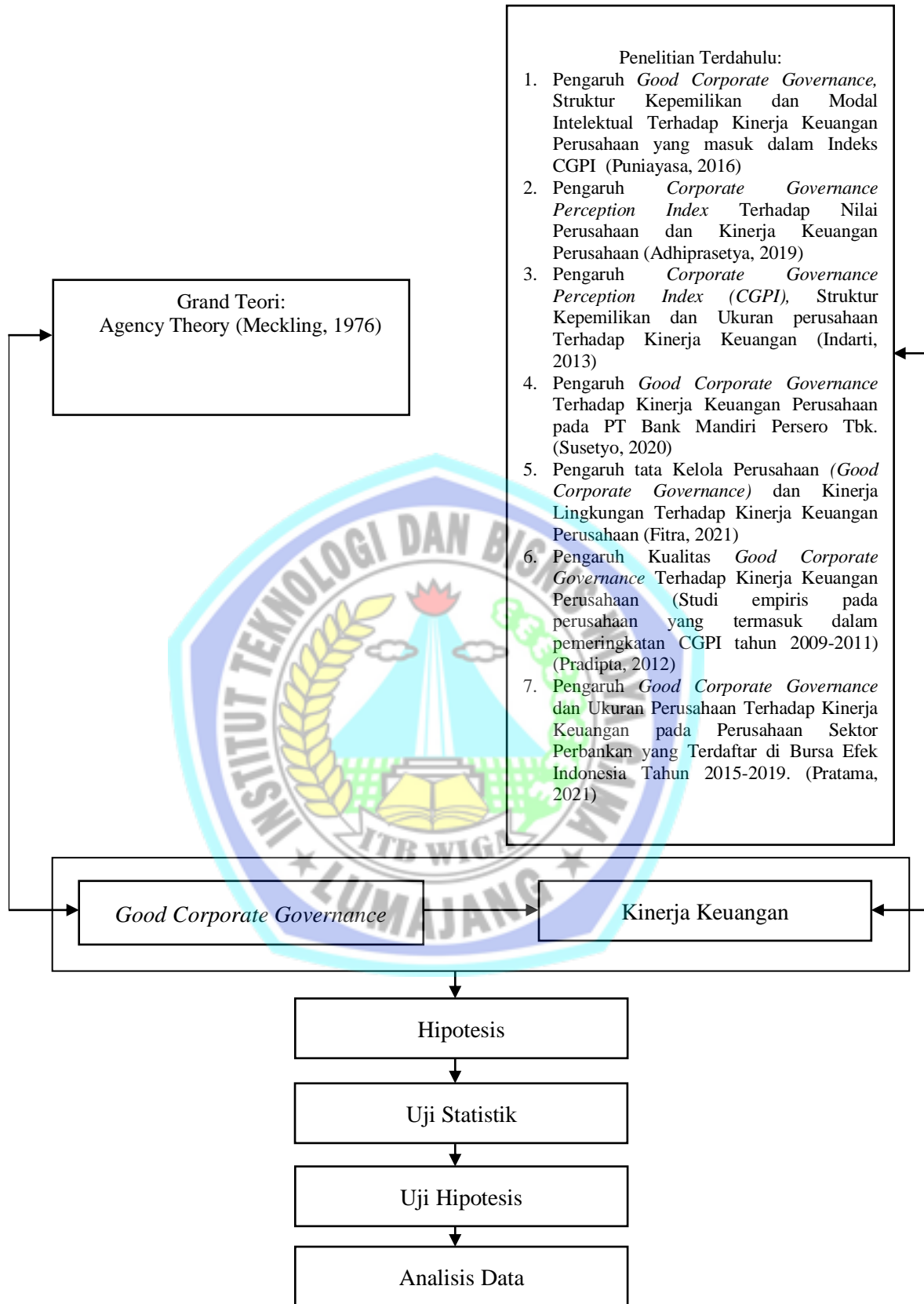
9	Jessica Goldwin dan Yunus Jogi Christiawan (2017)	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan sebagai Variabel Kontrol	Variabel x: Analisis GCG Variabel y: Kinerja Keuangan Variabel z: ukuran perusahaan, dan umur perusahaan	Analisis Regresi Linier Berganda	Seluruh variabel GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Umur perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
---	---	---	--	----------------------------------	--

Sumber: Data diolah penulis, 2022.

2.3 Kerangka Penelitian

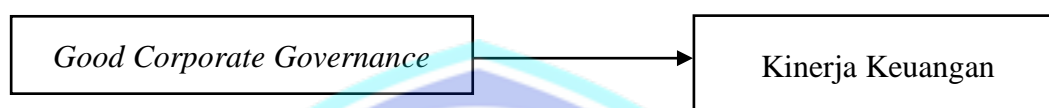
Kerangka penelitian Sugiyono (2012:89) merupakan penggabungan terkait hubungan antara variabel yang dirancang dari banyak teori yang telah dijelaskan. Teori-teori yang telah dijelaskan selanjutnya dianalisis secara sistematis dan kritis, sehingga nantinya menghasilkan penggabungan antara variabel yang akan diteliti. Penggabungan terkait variabel tersebut nantinya akan digunakan guna merumuskan sebuah hipotesis.

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran, akan lebih memudahkan pemahaman dalam mencermati arah atau jalur pembahasan dalam memberikan gambaran secara lebih rinci dan jelas mengenai keterkaitan antar variabel penelitian yang digunakan. Kerangka pemikiran ini pun disusun berdasarkan hasil pada telaah teoritis dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti lainnya. Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Sumber: Data diolah penulis, 2022.

Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan: (1) keterkaitan variabel yang akan diteliti; (2) macam dan jumlah berhubungan dengan rumusan masalah yang harus dijawab; (3) argumentasi yang dipergunakan untuk merumuskan suatu hipotesis; (4) banyaknya dan juga macam dari hipotesis; dan (5) metode dalam menganalisis statistik yang digunakan (Paramita, 2018:46-47). Kerangka dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Konseptual
Sumber: Data diolah penulis, 2022.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Teori *Agency* menggambarkan adanya hubungan positif antara shareholder dengan para manager melalui *Good Corporate Governance*. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manager. Adanya pemisahan antara agen dan *principal* terbaikannya kepentingan *principal*. Hal ini berarti, pemisahan tersebut menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Dalam hal ini konsep teori keagenan, *principal* akan memberikan wewenang kepada manager untuk mengurus sistem pada perusahaan, namun tindakan *principal* terkadang masih tidak bertindak sesuai yang seharusnya sehingga dapat menimbulkan masalah keagenan. Untuk meminimalisasi informasi

yang tidak seimbang, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian tata kelola perusahaan sebagai alat motivasi agen dalam menjalankan praktik bisnis untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

Jadi, dapat disimpulkan dari teori *agency* inilah, perusahaan menyadari perlunya penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perusahaan. Selain untuk meminimalisir kerugian akibat penyalahgunaan wewenang manajemen dalam pengelolaan perusahaan untuk memperoleh laba juga untuk menggambarkan citra yang baik bagi perusahaan kepada publik dan calon investor.

Good Corporate Governance dengan menggunakan indikator pengukuran seberapa baik terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan adanya pengukuran GCG yang terangkum dalam indikator menggunakan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dapat memudahkan *stakeholder* ataupun *investor* untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan atas pembelian saham kepemilikan. Struktural yang dilaporkan oleh perusahaan mencerminkan upaya perusahaan dalam manajemen perusahaan efektif atau tidak.

Variabel *Good Corporate Governance* perhitungannya diukur menggunakan skor sub indeks *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dipublikasikan oleh *The Indonesian Institute For Corporate Governance* (IICG). CGPI didasarkan pada lima tema yaitu hak pemegang saham (subindeks A), dewan direktur (subindeks B), dewan komisaris (subindeks C), komite audit dan audit internal (subindeks D), pengungkapan terhadap investor (subindeks E)(Liyundira, 2018). Terdapat 38 item yang diungkapkan CGPI dalam menilai

Corporate Governance yang berada dalam laporan tahunan perusahaan. Skor masing-masing sub indeks dinilai 1 jika memenuhi, dan dinilai 0 jika tidak memenuhi.

Komisaris independen merupakan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang dari pengetahuan dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susetyo (2020) dan Fitra (2021) menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Maka pengajuan hipotesis sebagai berikut:

H₁: *Good Corporate Governance* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.

